

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,  
KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAN KETAATAN  
PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**KANIA DELLANEIRA**

**G92218079**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Kania Dellaneira

NIM : G92218079

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Pelaporan Keuangan Dan Ketaatan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Januari 2023

Serta menyatakan



Kania Dellaneira

NIM. G92218079

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Surabaya, 01 Februari 2023

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**

Dosen Pembimbing



**Dr. IMAM BUCHORI, SE., M.Si**

**NIP : 196809262000031001**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAN KETAATAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Oleh

**Kania Dellaneira**

**NIM G92218079**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada  
tanggal 24 Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

#### Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Imam Buchori, SE., M.Si  
NIP. 196809262000031001  
(Penguji 1)
2. Mochammad Ilyas Junjuran, S.E., M.A.  
NIP. 199303302019031009  
(Penguji 2)
3. Hastanti Agustin Rahayu, SE., M.Acc., Ak., CA., BKP  
NIP. 198308082018012001  
(Penguji 3)
4. Muhammad Dliyaul Muflihini., S.E.I., M.E.  
NIP. 202202001  
(Penguji 4)

#### Tanda Tangan

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Surabaya, 24 Maret 2023

Dekan



**Arifin Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I**

**NIP. 197005142000031001**



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kania Dellaneira  
NIM : G92218079  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi  
E-mail address : kaniadellanei@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Pelaporan Keuangan dan Ketaatan Perundangan

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Oooktober 2023

Penulis

( Kania Dellaneira )

## ABSTRAK

Pelaksanaan *Good Governance* sudah lama dikemukakan namun pada praktiknya masih banyak menghadapi kendala di beberapa instansi pemerintah. Permasalahan yang terjadi pada sektor publik sangat beragam, namun utamanya soal pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat pada UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah tentang sistem desentralisasi. Tujuan penelitian yang telah dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Timur.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah badan keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketaatan terhadap perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah badan keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kualitas pelaporan keuangan dan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah badan keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Kualitas Pelaporan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2), dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hasil tersebut berhubungan positif dengan teori *Stewardship*, variabel sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan sebagai faktor penentunya. Hubungan teori *Stewardship* dengan beberapa variabel yang telah diujikan bahwa steward yang merupakan pemerintah akan berperilaku kolektif atau berkelompok, dengan demikian, terjadi kesepakatan di antara dua belah pihak yaitu pemerintah sebagai steward dan masyarakat sebagai principal yang berdasar kepada kepercayaan.

Kata Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Pelaporan, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

## ABSTRACT

The implementation of Good Governance has long been put forward but in practice there are still many obstacles in several government agencies. The problems that occur in the publik sektor are very diverse, but mainly about publik services. This can be seen in Article UU No. 23 of 2014 Regarding Regional Government regarding the decentralization system. The purpose of the research that has been done is to determine the effect of clarity on budget targets on performance accountability of government agencies, the Regional Financial and Asset Management Agency, East Java Province.

To find out how the influence of reporting quality on performance accountability of government agencies, financial bodies and regional assets in East Java Province. To find out how the influence of obedience to legislation on performance accountability of government agencies, financial bodies and regional assets in East Java Province. To find out how the effect of the clarity of budget targets, the quality of financial reporting and laws and regulations on the performance accountability of government agencies, financial bodies and regional assets in East Java Province.

The research results obtained are Clarity of Budget Targets (X1) which partially has a significant effect on Government Agencies Performance Accountability (Y). Reporting Quality (X2) partially has a significant effect on Government Agency Performance Accountability (Y). Compliance with Legislation (X3) partially has no significant effect on Government Agency Performance Accountability (Y). Clarity of Budget Targets (X1), Quality of Reporting (X2), and Compliance with Legislation (X3) have a significant effect simultaneously on Government Agencies' Performance Accountability (Y). These results are positively related to Stewardship theory, internal control system variables and compliance with laws and regulations as determining factors. The relationship between Stewardship theory and several variables that have been tested is that the stewards who are the government will behave collectively or in groups, thus, there is an agreement between the two parties, namely the government as the steward and the community as the principal based on trust.

**Keywords:** Clarity of Budget Targets, Quality of Reporting, Compliance with Legislation and Performance of Government Agencies.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>17</b>
1.1 Latar Belakang.....	17
1.2 Rumusan Masalah.....	26
1.3 Tujuan Penelitian .....	27
1.4 Manfaat Penelitian.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
2.2 Kajian Teoritis .....	33
2.1.1 Stewardship Theory .....	33
2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	34
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	43
2.4 Kerangka Konseptual.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>



3.1 Pendekatan Penelitian .....	46
3.2 Lokasi Penelitian.....	46
3.3 Definisi Operasional .....	47
3.3.1 Variable bebas (independent) .....	47
3.3.2 Variable terikat (dependen) .....	47
3.4 Populasi dan Sampel.....	50
3.4.1 Populasi .....	50
3.4.2 Sampel .....	50
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.5.1 Data.....	51
3.5.2 Sumber Data .....	51
3.5.3 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.5.4 Teknik Analisa.....	51
3.6 Uji Kualitas Data .....	52
3.6.1 Uji validitas.....	52
3.6.2 Uji reliabilitas .....	52
3.6.3 Uji asumsi klasik.....	52
3.6.4 Uji Hipotesis .....	55
3.6.5 Uji Simultan (Uji Statistik F).....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	58
4.2 Hasil Penelitian .....	59
4.2.1 Karakteristik Responden.....	59

4.2.2	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....	60
4.2.3	Analisis Statistika Deskriptif .....	62
4.3	Analisis Regresi Berganda.....	70
4.3.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	71
4.3.2	Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	72
4.3.3	Uji Koefisien Determinasi .....	73
4.4	Uji Asumsi Regresi Linier Berganda.....	67
4.4.1	Uji Asumsi Normalitas .....	67
4.4.2	Uji Asumsi Heteroskedastisitas .....	68
4.4.3	Uji Asumsi Multikolonieritas .....	70
4.5	Hasil Pengujian Hipotesis.....	74
4.6	Pembahasan .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>83</b>
5.1	Kesimpulan .....	83
5.2	Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 4.1 Definisi Operasional .....	48
Tabel 4.1 Kuesioner .....	58
Tabel 4.2 Karakteristik Responden .....	59
Tabel 4.3 Hasil Data Responden .....	60
Tabel 4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	61
Tabel 4.5 Penentuan Kategori Skor Berdasarkan Kategori Jawaban Responden .	63
Tabel 4.6 Persentase Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) .....	64
Tabel 4.7 Persentase Jawaban Responden Kejelasan Sasaran Anggaran (X1).....	65
Tabel 4.8 Persentase Jawaban Responden Kualitas Pelaporan (X2) .....	66
Tabel 4.9 Persentase Jawaban Responden Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) .....	67
Tabel 4.10 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	71
Tabel 4.11 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	72
Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi .....	74
Tabel 4.13 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov .....	68
Tabel 4.14 Hasil Uji Glejser .....	69
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas .....	70

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Kerangka Konseptual .....	45
Gambar 4.1 ScatterPlot .....	69



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Output Analisis Regresi Berganda .....	88
Lampiran 2 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	92
Lampiran 3 Output Analisis Deskriptif.....	98



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan *Good Governance* sudah lama diterapkan namun pada praktiknya masih banyak menghadapi kendala di beberapa instansi pemerintah seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pungutan liar, kewenang-wenangan, penyerobotan, penindasan dan penistaan. Permasalahan yang terjadi pada sektor publik sangat beragam, namun utamanya soal pelayanan publik. Maka dari itu pemerintahan Indonesia tidak pernah berhenti mengusahakan perwujudan *Good Governance* dari pemerintahan tingkat pusat sampai ke pemerintah tingkat daerah. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapainya *good governance*, hal ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki dalam upaya perwujudan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tata kelola yang baik. Dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia sendiri adalah sistem pemerintahan yang memberikan otonominya pada setiap daerah dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya dengan melakukan koordinasi dengan pemerintahan pusat dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Terkait Pemerintah Daerah tentang sistem desentralisasi. Sementara Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang yang sama menjabarkan bahwasanya “otonomi daerah meliputi : hak, wewenang, dan kewajiban otonom dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan daerah”. Dengan diberikannya kewenangan pemerintah sentra pada

pemerintah daerah, hal itu merupakan tanggungjawab asal pemerintah daerah guna menjamin akuntabilitas serta transparansi dari pemerintahan yang dijalankan (Kiki Andriany Hai, Ruddy R. Watulingas, 2021).

Pemerintah memutuskan target pencapaian kinerja instansi baik pemerintah sentra juga pemerintah daerah antara lain, sasaran pencapaian kinerja belanja, program kegiatan, satuan kerja perangkat daerah, baik konteks wilayah dengan tujuan dapat meningkatkannya akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran. Apalagi sekarang ini Indonesia dengan mayoritas masyarakat yang menuntut pemerintah bisa mengelola sistem pengelolaan keuangan daerah dan otonomi daerah untuk menjadi lebih baik. Besarnya tuntutan terhadap pengaplikasian akuntabilitas pada sektor publik sehingga dapat memberi informasi, salah satu diantaranya lewat laporan keuangan.

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya diatur peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana dalam peraturan tersebut setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk dari pertanggungjawaban guna meraih tujuan organisasi sesuai fungsi dan tugas primer pada bentuk laporan kinerja. Media pelaporan atas kegagalan atau keberhasilan instansi pemerintah atas perwujudan target dan tujuan organisasi yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun terjadinya ketidakstabilan kualitas kinerja bisa karena kurangnya kontribusi serta partisipasi perencanaan anggaran atas perwujudan program kegiatan, dalam hal ini susunan anggaran bukan dampak dari produksi,

akan tetapi target dan sasaran kebijakan politik anggaran yang belum dapat dipahami khalayak secara praktis. Jadi, pengelolaan anggaran yang tidak baik dan sah, pilihan prioritas kebijakan pada anggaran akan berakibat di terganggunya serta menurunnya kualitasnya pelayanan publik, hal tersebut dapat terjadi sebab Pemda gagal memahami prioritas aspirasi rakyat, sedangkan masyarakat tidak mengerti apa yang dimau serta dilakukan di Pemda dalam pembuatan kebijakan (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2014).

Pengaplikasian akuntabilitas publik memiliki tuntutan yang besar sehingga berakibat pada pengimplikasian bagi sebagian besar manajemen sektor publik untuk menyampaikan sebuah informasi salah satunya menggunakan laporan keuangan. Kerena kemampuan membentuk suatu informasi yang terbuka dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu organisasi. Informasi tersebut merupakan pertanggung jawaban pemerintah terkait akitivitas sebagai tanggung jawaban dengan adanya penyajian laporan keuangan kepada rakyat yang merupakan pengertian dari akuntabilitas publik. Sebab intinya akuntabilitas itu mendeskripsikan suatu keadaan yang bisa di pertanggungjawabkan dalam pemberian beberapa informasi serta pengungkapan atas kegiatan dan kinerja finansial pada pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dalam peningkatan sistem akuntabilitas salah satunya penyajian laporan keuangan. Mardiasmo (2021), menjabarkan bahwasanya untuk memberii informasi yang dapat dipergunakan pada pembuatan keputusan politik, sosial dan ekonomi serta bukti pengelolaan (*stewardship*) dan pertanggungjawaban (*accountability*) dapat menyampaikan informasi yang dipergunakan dalam



mengevaluasi kinerja organisasional dan manajerial menggunakan penyajian laporan keuangan. Oleh sebab itu, bentuk pertanggungjawaban publik untuk mengatasi dalam pelakuan rekayasa atas suatu tindakan kerjasama penggunaan laporan keuangan supaya bentuk tanggung jawab yang didapatkan sesuai menggunakan ketentuan yang ada sehingga dapat terhindar dari manipulasi data yang tidak bisa dihindarkan (Asih & Panca, 2021).

Anggaran sektor publik sendiri berisi tentang rancangan aktivitas yang dapat dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan serta belanja dalam satuan moneter. Alat yang membantu manajemen pada pengaplikasi, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan panduan kerja dalam menjalankan perusahaan menjadi tujuan yang sudah ditetapkan merupakan peranan anggaran. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan perwujudan bentuk finansial sebuah rencana operasi keuangan di suatu organisasi serta disusun secara sistematis untuk beberapa periode yang mencakup perkiraan pengeluaran yang diusulkan serta asal pendapatan akan digunakan buat membiayai pengeluaran organisasi tersebut.

Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara no.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Wacana pelaporan dan pedoman penyusunan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan dasar wujud kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam meraih ujuan dan terget yang telah ditetapkan lewat alat pertanggungjawaban secara periodik adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Karena penyelenggaraan pemerintah yang baik dan

bersih yang didorong tuntutan dari masyarakat dapat meningkatkan pengembangan serta penerapan sistem pertanggungjawaban yang efektif, teratur, tepat dan jelas yang dikenal menggunakan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebuah sistem diterapkan dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (Putra, n.d.).

Seperti salah satu instansi pemerintah di kota Surabaya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan suatu instansi yang berfungsi sebagai penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan. Fungsi-fungsi yang dimaksudkan adalah:

1. Menyusun kebijakan teknis yang ada di bidang keuangan
2. Melaksanakan tugas dengan dukungan teknis di bidang keuangan
3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis yang ada di bidang keuangan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah yang ada di bidang keuangan
5. Pelaksanaan administrasi badan yang ada di bidang keuangan
6. Melaksanakan fungsi lain yang Gubernur berikan sesuai wewenang dan fungsinya.

Pada instansi ini terdiri dari 6 bidang dengan 1 bidang secretariat dan 5 bidang khusus seperti Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Aset, dan Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota.

Suatu gambaran mengenai tingkat pemenuhan sasaran sebuah Lembaga pemerintahan selaku penguraian misi, visi dan rancangan Lembaga pemerintahan yang memperlihatkan level kesuksesan serta ketidakberhasilannya penerapan aktivitas serta kegiatan sesuai program dan peraturan yang diputuskan menghasilkan terbentuknya layanan kepada masyarakat merupakan perwujudan kinerja instansi pemerintah. Melalui evaluasi kinerja, pemerintah akan mampu menetapkan beragam cara pada menjaga maupun memaksimalkan kinerjanya. Penilaian kinerja seharusnya mencerminkan kedudukan kinerja Lembaga pemerintah.

Penelitian terdahulu (Harianto et al., 2021) mengatakan dampak untuk kinerja instansi pemerintah diantara yakni salah satunya ialah kejelasan sasaran anggaran. Karena sampai mana tujuan anggaran ditetapkan secara khusus dan jelas mempergunakan tujuan supaya anggaran bisa dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian merupakan tingkat kejelasan sasaran anggaran. Sesuai penelitian sebelumnya oleh Imam Buchori et, al (2021) mengungkapkan bahwasanya ada korelasi antara kejelasan anggaran dengan kinerja manajerial. Kinerja manajerial yang baik bertujuan untuk mencapai akuntabilitas kinerja.

Perencanaan yang sesuai target bertujuan agar keringanan yang diperoleh personia dan eksistensi tujuan dana yang tidak samar dapat mencapai sasaran finansial. Setiap instansi pemerintah atau pihak-pihak yang diberi tanggungjawab wajib melaporkan pertanggungjawabannya atas tugas yang sudah dipercayakan. Tingkat pengungkapan kinerja pemerintah daerah lewat akuntabilitas pemerintah merupakan pokok krusial bagi keberlangsungan dalam pengungkapan

penyampaian kejelasan sasaran anggaran oleh pemerintah yang direalisasikan dengan sistem pelaporan yang transparan. Kejelasan sasaran anggaran sendiri merupakan sejauh mana tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab (Suharono dan Solichin, 2006). Maka dari itu, menurut (Rahman & Yusuf, 2021) kejelasan tujuan anggaran harus berorientasi pada hasil akhir, mempunyai tujuan primer, terikat waktu, terstandarisasi, terukur serta spesifik. Sebab sasaran anggaran yang makin tepat sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah makin baik.

Sedangkan menurut Nining (2020), apabila informasi mengenai kinerja pemerintah tidak dapat disampaikan secara relevan, handal, transparan serta bisa dimengerti masyarakat yang menjadi konstituenya sehingga akan timbul permasalahan akuntabilitas publik. Sebab komponen penting dalam penciptaan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik merupakan penyusunan laporan keuangan sektor publik. Pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban penggunaan keuangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasari perencanaan strategis merupakan kewajiban dari instansi pemerintah. Karena pada dasarnya keuangan yang akuntabel serta transparan merupakan wujud pengelolaan keuangan wilayah daerah yang dapat dipertanggungjawabkan (Ridzal, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya menurut Mochammad Iqbal et, al (2021) dampak mendasar terjadinya akuntabilitas kinerja yang baik dan benar merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pemerintah. Hal ini juga dapat dilihat dari faktor keerhasilan apa saja yang berpengaruh secara signifikan pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, seperti penelitian pada Bappeda Sleman dan Sekretariat

Bantul yaitu ada 2 faktor. Faktor tersebut antara lain faktor budaya dan ketaatan perundang-undangan (Fadhlurrohman & Khairina, 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian Dina Karima et, al (2021) bahwa sistem akuntansi memiliki efek pada ketaatan pada perundangan, pemahaman akuntansi, serta pemerintahan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang) yang secara simultan variable sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan daerah, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dipengaruhi oleh adanya pemahaman serta ketaatan perundangan. Secara parsial variable berpengaruh pada penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Namun variable ketaatan pada perundangan tidak mempengaruhi secara parsial pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Karima, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu Evada Et, al (2020), tentang ketaatan pada peraturan perundangan, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang secara parsial, ketaatan pada perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara signifikan. Pada penelitian ini nilai adjusted  $R^2$  penelitian ini yaitu 40,3% , sementara 59,7% untuk sisanya dipengaruhi oleh variable lain, sehingga diperlukan penambahan variable lain seperti komitmen, tingkat disiplin, kompetensi, motivasi, negosiasi dan budaya organisasi.(Dewata et al., 2020)

Akuntabilitas kinerja instansi dapat dilihat dengan adanya fraud yang pernah terjadi pada instansi tersebut. Seperti pada instansi diantaranya yakni BPKAD Jatim

terjadi kasus *fraud* terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019. Ketua DPRD Tulungagung ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini dengan dugaan menerima uang sebesar Rp 4,88 Milyar selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung. Kasus suap ini berhubungan dengan pelaksanaan, pengesahan dan pembahasan APBD atau APBD Perubahan kabupaten Tulungagung. Penerimaan dana yang diduga guna melancarkan proses pembahasan APBD, pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak 2014 hingga 2018 (Yohanes, 2019). Dari kasus ini mantan Ketua BPKAD provinsi Jawa Timur diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keterkaitan ini (H, 2019). Dalam hal ini kinerja instansi dinilai kurang baik karena kejelasan sasaran anggaran harusnya lebih diperhatikan. Pada awal tahun 2021 Gubernur Jawa Timur meminta agar BPKAD Provinsi Jawa Timur untuk dapat menyelesaikan pendataan asset dan sertifikasi asset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga mengatakan bahwa banyak asset milik Pemprov Jawa Timur yang perlu didata Kembali (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2021a). Hal ini masih berlanjut pada bulan berikutnya, Februari. KPK meminta kepada pemerintah daerah Provinsi untuk segera menyelesaikan sertifikasi asset milik pemerintah daerah masing-masing (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2021b). Kemudian pada bulan September 2021, pembahasan perubahan APBD Jatim disertai banyak interupsi dan beberapa anggota keluar dari ruangan. Pembahasan perubahan APBD dianggap tidak sesuai ketentuan. Sementara, tim anggaran dari Pemprov Jatim yang hadir Plh Sekdaprov Hery Tjahjono, Kepala Bappeda M Jasin, dan Kepala BPKAD

Bobby Sumiarsono bahkan tidak masuk ke ruang rapat tersebut (Martudji, 2021). Pada tahun 2021 pengesahan APBD 2022 terlambat dikarenakan adanya penurunan dana transfer dari pemerintahan pusat akibat pandemic Covid-19 (Suminar, 2021). Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur menilai bahwa realisasi APBD 2021 kurang transparan, bertanggung jawab dan akuntabel (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2021c). Dengan ini kualitas pelaporan keuangan sebuah instansi juga dinilai kurang baik.

Maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Pelaporan Keuangan Dan Ketaatan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur”** dengan maksud penambahan variable komitmen dan kompetensi menggunakan Kualitas Pelaporan Keuangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah kualitas pelaporan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah ketaatan perundangan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur?

4. Apakah kejelasan sasaran anggaran, kualitas pelaporan keuangan dan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak diraih oleh peneliti yaitu :

- a. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Timur.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kuelitas pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah badan keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Timur.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketaatan terhadap perundangan terhadap akuntabilitas kinerja isntansi pemerintah badan keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Timur.
- d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kualitas pelaporan keuangan dan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja isntansi pemerintah badan keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang akademis maupun praktis sebagai berikut :

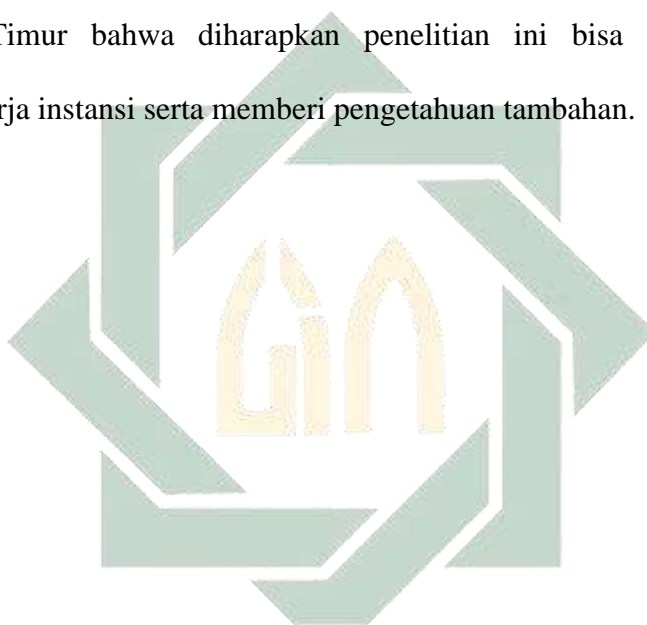
- a. Kontribusi Akademis



Peneliti berharap penelitian ini kedepannya dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terlebih pembahasan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang dilihat dari Pengaruh Ketaatan Perundangan, Kualitas Pelaporan Keuangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran.

b. Kontribusi Praktis

Bagi Instansi Pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur bahwa diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi serta memberi pengetahuan tambahan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dasar yang dipakai untuk penulisan skripsi ini yaitu penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya :

**Tabel 2.1.1 Penelitian Terdahulu**

Judul	Penulis	Pembahasan	Perbedaan
<p style="text-align: center;">“Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (2020)</p>	<p style="text-align: center;">Evada Dewata, Yuliana Sari, Hadi Jauhari, dan Tifani Dwi Lestari</p>	<p style="text-align: center;">Secara positif signifikan ketaatan pada sistem pelaporan dan peraturan perundangan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini ialah penambahan variable bebas yakni Sasaran Anggaran dan Kualitas Pelaporan dan Kejelasan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.</p>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<p>“The Influence Of Budget Accuracy, Clarity Of Budget Targets, and Managerial Control On Performance Accountability” (2020)</p>	<p>Nining Asniar Ridzal</p>	<p>Secara positif signifikan kualitas laporan keuangan berpengaruh pada aset daerah dan akuntabilitas kinerja badan pengelolaan keuangan kabupaten buton</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti ialah penambahan variable bebas yakni Kejelasan sasaran Anggaran dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan.</p>
<p>“Pengaruh Ketepatan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pengendalian Manajerial terhadap Akuntabilitas Kinerja” (2021)</p>	<p>Krisna Vita Rosalinda Dan Titukdiah Widajantie</p>	<p>Menjelaskan bahwa ketepatan anggaran berpengaruh pada akuntabilitas kinerja dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah dengan penambahan variable Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Kualitas Pelaporan Keuangan sehingga dapat diketahui lebih jelas pengaruh akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah.</p>

<p>“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampan)” (2021)</p>	<p>Dina Karima, Maslichah, Dan Dwiyani Sudaryanti</p>	<p>Menjelaskan bahwa secara simultan variable ketaatan pada peraturan perundangan, pemahaman akuntansi dan penerapan sistem akuntansi pemerinah daerah berpengaruh pada akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah daerah. Secara parsial variable penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah perhitungan secara parsial akan variable karena peneliti akan menambahkan dua variable bebas yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kualitas Pelaporan Keuangan.</p>
<p>“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (2021)</p>	<p>Azizah Rahman dan Marwah Yusuf</p>	<p>Secara positif signifikan variable kejelasan sasaran anggaran berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam perangkat daerah kota makasar. Secara positif signifikan variable sistem pelaporan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam perangkat daerah kota makasar.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti akan meneliti secara simultan antar variable sehingga tidak hanya secara parsial.</p>

<p>“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singing (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singing)” (2020)</p>	<p>Pebri Asari Putra</p>	<p>Secara simultan kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, pengendalian akuntansi dan ketaatan pada peraturan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPD dalam penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singing.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah sasaran yang dituju oleh peneliti dan penambahan variable.</p>
<p>“Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)” (2021)</p>	<p>Deni Harianto, Kennedy, dan Arumega Zarefar</p>	<p>Menjelaskan bahwasanya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dalam pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah pengukuran Akuntabilitas Kinerja melalui penambahan variable yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan dan Ketaatan Pada Perundangan.</p>

<p>“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (2019)</p>	<p>Yogi Isnanto, Suharno dan Bambang Widarno</p>	<p>Menjelaskan bahwasanya secara parsial dan signifikan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara parsial berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti akan mengukur secara parsial maupun simultan serta menambahkan dua variable bebas yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan dan Perundangan.</p>
<p>“The Effect of Budgeting Participation, Budget Target Clarity and Authority Transfer on Managerial Performance” (2021)</p>	<p>Bonifacius H. Tambunan</p>	<p>Menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Manajerial.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti akan meneliti pada akuntabilitas kinerja dimana hal ini adalah hasil dari Kinerja Manajerial. Serta peneliti akan menambahkan variable bebasnya.</p>
<p>“Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau” (2021)</p>	<p>Kusnadi Yudha Wiguna, Anggia Syafitri, Ria Meika Putri</p>	<p>Kualitas Laporan yang baik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada pengadilan agama.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini ada dengan menguji ulang apakah variable tersebut berpengaruh terhadap akuntabilitas di Instansi Pemerintahan yang berbeda.</p>

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.1.1 Stewardship Theory

Stewardship Theory menjabarkan bahwasanya Manajemen tidak mempunyai suatu tujuan pribadi namun lebih mengarah pada tujuan yang ada hubungannya dengan kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Oleh sebab itu, Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni Lembaga instansi pemerintah daerah yang menjalankan sesuatu yang direncanakan dengan mementingkan kepentingan umum juga dapat melaporkan serta menyajikan informasi keuangan secara tepat waktu dengan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut ditunjukan jelas pada masyarakat publik. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwasanya masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah secara bertanggungjawab serta transparan sesuai hak yang dimilikinya.

### **2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas yakni sebuah kewajiban penyampaian tanggungjawab atau untuk menjawab serta menjabarkan tindakan atau kinerja sebuah badan hukum/seseorang/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau yang berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Sementara itu hasil dari kegiatan yang ingin atau telah diraih berhubungan dengan adanya pemakaian atau pemanfaatan anggaran dengan kualitas serta kuantitas yang terukur merupakan sebuah kinerja. Indikator kinerja utama ialah suatu simpulan hasil berbagai program serta kegiatan yang berfungsi sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi serta juga merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Kinerja Instansi Pemerintah yakni tingkatan pencapaian sasaran serta tujuan sebuah instansi pemerintah yang mengindikasi berhasil dan gagalnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan adanya program kewajiban yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, 2014).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sendiri bisa ditingkatkan dengan melalui penerapan target antara lain :

- Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
- Meningkatnya kinerja instansi pemerintah

Untuk indikator dari pencapaian penguatan akuntabilitas kinerja diantaranya :

- a. Pemimpin yang secara langsung terlibat dalam penyusunan perencanaan strategis (renstra), keterlibatan pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja, dan pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Penyusunan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja harus didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan RI.
- b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja meliputi pelaporan kinerja, pengukuran kinerja, dan pengelolaan data kinerja yang bisa diukur dengan menggunakan indikator berikut:
- c. Unit kerja sudah berupaya dalam meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
- d. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi mengenai kinerja;
- e. Unit kerja telah menyusun laporan kinerja dengan tepat waktu;
- f. Perjanjian Kinerja dibuat hingga level pejabat eselon v (lima) dan jaksa fungsional;
- g. Indikator kinerja telah memiliki kriteria *specific, measurable, achievable, relevant and time bound* (SMART);
- h. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
- i. Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;



Instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan serta kegagalan misi organisasinya menggunakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini meliputi beberapa komponen yang termasuk dalam perencanaan stratejik seperti pelaporan kinerja, pelaporan kinerja dan pengukuran kinerja. Instrumen yang dipergunakan instansi pemerintah dalam hal pemenuhan kewajiban untuk bertanggung jawab atas kegagalan ataupun keberhasilan dari pelaksanaan misi organisasi yakni dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yakni sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan stratejik ialah sebuah proses yang berorientasi dengan hasil yang hendak diraih dalam waktu 5 tahun secara sistematis serta berkesinambungan. Hasil dari proses ini adalah sebuah rencana stratejik yang didalamnya mencakup sasaran, tujuan, visi, misi serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan dan bisa dicapai.

Perencanaan kinerja yakni suatu indikator kinerja sesuai program kebijakan atau proses penetapan kegiatan tahunan, serta sasaran yang telah dibuat dalam rencana stratejik. Output dari seluruh proses tersebut merupakan rencana kinerja tahunan.

### **1) Kejelasan Sasaran Anggaran**

Definisi anggaran pemerintah sesuai peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 ialah “dokumen formal yang merupakan hasil dari kesepakatan antara legislatif dan eksekutif mengenai belanja yang ditentukan guna melaksanakan aktivitas

pemerintah serta pendapatan yang diharapkan guna menutupi beragam kebutuhan belanja atau pembiayaan yang dibutuhkan apabila diperkirakan akan terjadi surplus maupun defisit”. Sehingga kejelasan sasaran anggaran yakni sampai mana tujuan anggaran itu dapat ditetapkan dengan tujuan yang spesifik serta jelas supaya anggaran itu bisa dipahami oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Karena pada dasarnya kejelasan sasaran anggaran merupakan karakteristik anggaran.

Anggaran yang disusun dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah yakni suatu proses yang mengandung muatan politis serta cukup rumit. Penyusunan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam satu tahunnya dilaksanakan secara spesifik dan jelas yang merupakan desain teknis pelaksana, strategi untuk meraih tujuan daerah yakni anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD. Hal yang termuat dalam anggaran yang baik tidak hanya mengenai pembiayaan umum, belanja dan pendapatan lebih dari itu anggaran harus memberi informasi terkait kondisi dari kinerja pemerintah daerah yang hendak diraih sehingga anggaran bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah bisa menjadi penentu dari kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi daerah. Sehingga adanya kejelasan sasaran anggaran akan memotivasi pihak manajer untuk lebih efektif serta juga melaksanakan yang terbaik bila dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas.

Dampak yang diakibatkan dari ketidakjelasan sasaran anggaran pada pelaksanaan anggaran menjadi bingung serta tidak puas saat bekerja. Hal tersebut membuat pelaksanaan anggaran tidak bisa termotivasi untuk menggapai kinerja

yang diharapkan. Terdapat karakteristik utama dalam penentuan sasaran anggaran, yaitu :

- Sasaran harus menantang akan tetapi bisa diiraih.
- Sasaran harus spesifik bukan samar-samar.

Terdapat indikator agar dalam pengukuran sasaran efektif diantaranya :

- a. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi
- b. Tingkat kesulitan, menetapkan sasaran sesuai kepentingan dan tingkat kesulitannya
- c. Sasaran prioritas, membuat sasaran yang prioritas
- d. Jangka waktu, menetapkan jangka waktu yang diperlukan dalam pengerjaan
- e. Menetapkan standar atau target yang akan dicapai
- f. Kinerja, dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diukur
- g. Tujuan, membuat secara jelas tugas yang hendak dikerjakan.

Pekerja akan merasa terbantu dengan sasaran yang jelas yakni dalam hal menggapai kinerja yang diinginkan, yang mana hal itu dengan melihat sasaran anggaran tingkat kinerja bisa tercapai. Keterlibatan dari individu dalam mengetahui sasaran yang hendak dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan pencapaiannya dengan mempergunakan sumber yang ada, selanjutnya akan disusun target-target anggaran sesuai yang hendak dicapai.

## **2) Kualitas Pelaporan Keuangan**

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, “laporan keuangan merupakan laporan yang berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu pelaporan”. Sesuai peraturan pemerintah No. 8

Tahun 2006, mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menjabarkan bahwasanya “laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode”. Sehingga laporan keuangan merupakan suatu proses akuntansi yang berstruktur terkait laporan posisi keuangan suatu periode akuntansi, laporan keuangan haruslah bermanfaat bagi pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan serta harus sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Menurut Tujuan (PSAP 01) , penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antarperiode, maupun antarentitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan ialah untuk memberi beragam informasi terkait dengan arus kas entitas, posisi keuangan serta kinerja keuangan yang berguna untuk memakai laporan keuangan dalam membuat sebuah keputusan ekonomi. Sehingga penyajian informasi dalam laporan keuangan yang bisa dengan mudah untuk dipahami serta memenuhi kebutuhan pemakainya pada pengambilan keputusan disebut juga dengan kualitas pelaporan keuangan. Kualitas laporan keuangan sendiri harus bisa di andalkan, bebas dari kesalahan material yang nantinya laporan keuangan tersebut bisa diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Dasar akuntansi menegaskan kualitas laporan keuangan yang bermanfaat bagi pembaca seperti pemegang saham atau investor yang berkeinginan untuk

berinvestasi pada perusahaan, bagaimana penyajian dari laporan keuangan yang menjadi gambaran kinerja dan prospek perusahaan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai situasi perusahaan yang sesungguhnya. Dalam atribut yang berbasis pasar menegaskan kualitas pelaporan keuangan yang penilaiannya dari respon pasar. Berikut ini atribut yang termasuk di dalam basis akuntansi meliputi perataan laba, prediktibilitas, presistensi dan kualitas aktual. Sementara atribut dengan basis pasar terdiri atas konservatisme, ketepatan waktu, dan relevansi nilai.

Arti dari kualitas pelaporan keuangan dilihat dari sudut pandang ada dua. Untuk pandangan pertama mengungkapkan bahwasanya kualitas sebuah pelaporan keuangan ini ada kaitannya dengan kinerja seluruh perusahaan tergambarkan dari laba perusahaan. Apabila pada laba tahun berjalan bisa dipergunakan sebagai indikator yang baik untuk laba perusahaan di masa mendatang atau berasosiasi secara kuat dengan arus kas operasi di masa mendatang maka informasi pelaporan keuangan dapat dinyatakan berkualitas. Implikasi dari pandangan pertama ini mengindikasikan bahwasanya fokus dari pengukuran kualitas pelaporan keuangan perusahaan berhubungan dengan sifat-sifat pelaporan keuangan. Kemudian untuk pandangan kedua mengungkapkan bahwasanya kualitas pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja saham perusahaan di pasar modal. Adanya hubungan yang makin kuat antara imbalan pasar dengan laba memperlihatkan semakin tingginya informasi pelaporan keuangan.

Adapun beberapa karakteristik dari kualitas laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011:7), yakni:

a. Bisa Dipahami

Kualitas paling penting dari informasi pada laporan keuangan ialah mudah dimengerti oleh penggunanya. Pengguna laporan dalam hal ini diperkirakan telah mempunyai keinginan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar serta mempunyai pengetahuan yang cukup baik mengenai segala aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi.

b. Relevan

Informasi agar bisa memberi manfaat maka haruslah relevan agar memenuhi kebutuhan pengguna ketika mengambil keputusan. Informasi tersebut mempunyai kualitas relevan apabila bisa berpengaruh pada hasil putusan ekonomi pemakai sehingga akan terbantu dalam hal pengevaluasian peristiwa masa depan, masa kini atau masa lalu, mengkoreksi atau menegaskan, hasil evaluasi mereka di masa lalu

c. Keandalan

Informasi supaya bisa memberi manfaat maka haruslah andal (*reliable*). Informasi tersebut akan andal jika bisa diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus sekaligus jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan bisa disajikan, terbebas dari kesalahan material, serta dari arti yang menyesatkan.

d. Bisa Dibandingkan

Pemakai laporan keuangan diwajibkan dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya guna melakukan indentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna laporan keuangan juga diwajibkan untuk bisa membandingkan laporan keuangan.

e. Ketaatan Pada Perundangan

Sebuah acuan bagi akuntansi pemerintah (*a manual for government accounting*) diciptakan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yakni dengan pemenuhan syarat perundangan dan undang-undang guna membentuk akuntansi pemerintah yang berdasar karakteristik serta mempunyai tujuan yakni dalam hal pemenuhan akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Penyusunan teori akuntansi secara logis yaitu suatu proses yang terlaksana secara urut dari pengembangan tujuan laporan keuangan sampai penurunan kerangka kerja yang konstitusi atau konseptual yang dipergunakan sebagai petunjuk teknik akuntansi. Mengarah pada kerangka konseptual pada *financial accounting standards boards* (FASB), sampai dengan saat ini termasuk proyek yang paling menonjol dalam penciptaan konstitusi akuntansi. Konstitusi tersebut haruslah melindungi kepentingan publik dalam era yang dipengaruhi oleh pelaporan keuangan, memperlihatkan perilaku kolektif dan mendapatkan penerimaan umum.

Amanah konstitusi dipergunakan sebagai dasar dari bentuk pertanggungjawaban dari keuangan negara yang dikelola oleh pemerintahan. Fungsi tersebut di Indonesia telah dilaksanakan dan diatur dalam Undang-undang APBN dan UUD 1945 pasal 23 ayat 5. Pertanggungjawaban keuangan Negara wajib dibuat oleh pemerintah yang termasuk bagian dari akuntabilitas publik yang wajib diberikan oleh pemerintah atas pemakaian dan pemanfaatan keuangan negara yang didapatkan dari penduduk serta bertujuan untuk mensejahterahkan seluruh masyarakat.

Suatu bentuk aturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau lembaga negara dan kekuatannya mengikat yakni peraturan perundang-undangan. Peraturan negara dan undang-undang bertujuan dalam mengatur serta menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepatuhan yang dimiliki individu dalam menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pejabat atau Lembaga Negara yang memiliki kewenangan dan mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat agar dapat menertibkan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah ketaatan pada perundangan (Razi, 2017).

### **2.3 Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban untuk pertanyaan sebuah penelitian. Oleh karena itu, adanya hubungan antara pernyataan masalah dengan hipotesis adalah pernyataan masalah merupakan masalah penelitian. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan asumsi. Dari landasan rumusan masalah yang dijabarkan peneliti sebelumnya, hipotesis yang dapat diperoleh yakni :

**H1** : Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Pelaporan Keuangan dan Ketaatan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

**H2** : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

**H3** : Kualitas Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur



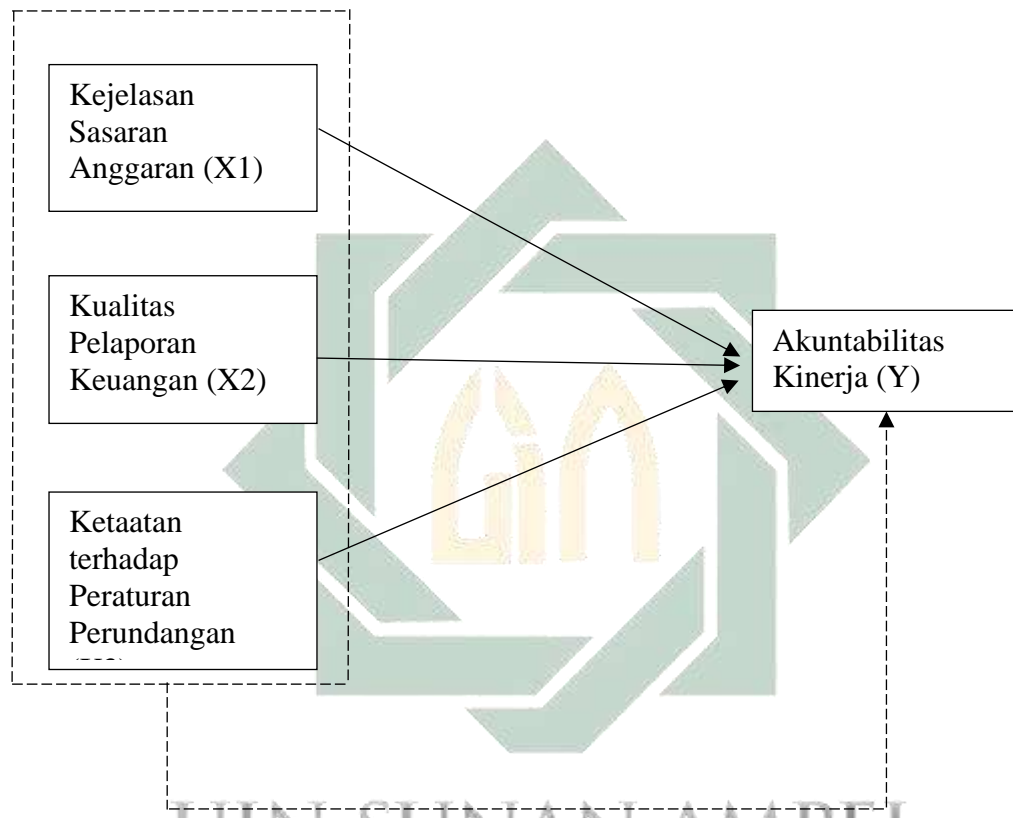
**H4** : Ketaatan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## 2.4 Kerangka Konseptual

Dalam memberikan gambaran mengenai latar belakang sebelumnya serta rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut gambaran umum mengenai penelitian ini yang termuat dalam kerangka konseptual yakni :



**Gambar 2.4.1 Kerangka Konseptual**

S U K A D A Y A

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode yang dipergunakan oleh peneliti yakni metode penelitian kuantitatif sementara untuk jenis penelitian yakni penelitian survei. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang pada peneleitiannya membentuk informasi yang lebih terukur menggunakan adanya data yang dijadikan landasan. Penelitian kuantitatif tidak mempermasalahkan hubungan antara peneliti dengan subyek yang diteliti. Penelitian kuantitatif memiliki sampel yang adalah dasar dalam ketepatan serta pengambilan kesimpulan dalam penggunaan instrument terhadap pengukuran variable merupakan indikator utama untuk mengukur (Ahyar et al., 2020). Variable yang diukur (biasanya menggunakan alat penelitian) akan menghasilkan angka yang dapat dianalisis menurut prosedur statistik. Laporan penelitian dimulai dari pendahuluan, tinjauan Pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan peelitian, kesimpulan dan rekomendasi, dengan struktur yang ketat dan konsisten. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik statistic korelasi (regresi). Teknik ini menjelaskan pengaruh antara variable yang satu dengan yang lain.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian pada instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yang beralamat pada Jl. Johar No. 19-21, Surabaya. Pelaksanaan penelitian selama tiga bulan dari tanggal 7 Februari 2022 hingga 6 Mei 2022.

### 3.3 Definisi Operasional

#### 3.3.1 *Variable bebas (independent)*

Variable bebas yakni variable yang mempengaruhi variable lain. Variable ini bersimbol “x”. pada penelian yang akan dilakukan terdapat *Variable Indepent* yaitu kejelasan sasaran anggaran, kualitas pelaporan dan ketaatan pada peraturan perundangan.

#### 3.3.2 *Variable terikat (dependent)*

Variable terikat adalah variable yang dipengaruhi oleh variable bebas. Variable ini dilambangkan dengan symbol “y”.

Sebagaimana pembahasan pada bab II, pada penelitian ini variable independennya adalah yang pertama kejelasan sasaran anggaran yakni sampai mana tujuan anggaran itu ditetapkan dengan tujuan yang spesifik supaya bisa dipahami orang yang bertanggungjawab terhadap capaian sasaran anggaran tersebut.

Pekerja akan terbantu dengan kejelasan sasaran yaitu dalam hal membuat pencapaian kinerja yang diperlukan guna mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Untuk kualitas pelaporan keuangan merupakan penyajian dari informasi pada laporan keuangan yang bisa dimengerti dan juga pemenuhan kebutuhan penggunanya pada pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material, arti yang menyesatkan dan juga dapat diandalkan. Sebagai akibatnya laporan keuangan tersebut bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sebab kualitas laporan keuangan sendiri dapat diartikan dengan cerminan kinerja pegawai. Sedangkan ketaatan peraturan

perundangan merupakan ketaatan terhadap suatu aturan tertulis yang lembaga negara atau pejabat berwenang buat serta kekuatannya mengikat.

Dengan begitu kualitas kinerja pegawai dapat dilihat menggunakan bagaimana pentaatan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam variable dependent pada penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yakni suatu perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah dalam hal bertanggung jawab atas gagal atau berhasilnya misi organisasi yang dilaksanakan pada pencapaian sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkannya lewat sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dengan begitu bisa diambil beberapa indikator yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tujuan penelitian. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut yang digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Definisi Operasional**

Variable	Indikator	Skala
Kejalasan sasaran anggaran (X1) (Herawaty, 2014)	Tingkat pengembalian Produk Bidang kegiatan Perencanaan Pusat tanggung jawab	Ordinal
Kualitas pelaporan (X2) (Wiguna et al., 2021)	Dapat dipahami Dapat dibandingkan Andal Relevan	Ordinal
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	Akuntabilitas yang dilaksanakan mentaati peraturan yang ada	Ordinal

Variable	Indikator	Skala
(X3) (Dewata et al., 2020)	<p>Diberikan sanksi apabila apabila tidak mentaati peraturan</p> <p>Laporan yang dibuat sudah mempergunakan PP No 8/2006 mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah</p> <p>Laporan yang dibuat sudah mempergunakan PP No 58/2007</p> <p>Laporan yang dibuat sudah mempergunakan PP No 21/2011 tentang pengelolaan keuangan daerah</p>	
<p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) (Dewata et al., 2020)</p>	<p>Pertanggungjawaban kebijakan pemerintah</p> <p>Ada hubungan antara pencapaian kinerja dengan kebijakan dan program</p> <p>Pertimbangan program telah sesuai dengan rencana strategik</p> <p>Pertimbangan program telah sesuai dengan indikator kinerja</p> <p>Menganalisis keuangan setiap program/kegiatan telah dilakukan</p> <p>Kegiatan/program yang dilaksanakan dikontrol dengan ukuran kinerja dan indikator yang jelas</p> <p>Menggunakan LAKIP menjadi pertimbangan dalam perencanaan kegiatan/program</p> <p>Membuat laporan mengenai kegiatan/program yang sudah dilakukan</p>	Ordinal

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi yakni wilayah generalisasi yang mencakup objek/entitas dengan sifat dan karakteristik tertentu yang dapat digunakan peneliti guna mempelajari dan selanjutnya menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi tidak sekadar terdiri dari orang-orang, namun pula hal-hal atau hal-hal lain yang hendak dikaji.

Peneliti mempergunakan populasi yakni seluruh pegawai atau karyawan pada instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 116 pegawai.

#### **3.4.2 Sampel**

Sampel yakni bagian atau wakil dari populasi. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian, tidak meneliti secara menyeluruh populasi namun sebagian saja dari populasi yang akan diteliti (Rahmadi, 2011). Teknik pengambilan sampling yang mencerminkan keadaan yang berarti ringkasan dari hasil penelitian dari sampel harus termasuk kesimpulan dari populasi.

Sampel pada penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan Teknik sampling jenuh dengan menggunakan seluruh anggota populasi yang dipakai sebagai sampel. Sampel pada penelitian ini yaitu semua anggota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.5.1 Data**

Data kuantitatif primer menjadi data yang dipergunakan pada penelitian ini. Data berwujud angka atau numerik dari objek yang diteliti yakni data kuantitatif.

#### **3.5.2 Sumber Data**

Data primer menjadi sumber data yang dipergunakan penelitian ini. Data yang dengan langsung didapat dari sumber data pertama pada objek penelitian berada atau pada lokasi penelitian yakni data primer.

#### **3.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yakni penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah teknik mengumpulkan data untuk menganalisis sikap, keyakinan, perilaku, dan sikap banyak orang, terutama dalam suatu organisasi (Siregar, 2017). Selain itu, pertanyaan dibagikan, dikumpulkan dan dikumpulkan secara langsung. Pada penelitian ini kuisisioner akan diberikan kepada karyawan/pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini peneliti menunggu selama kurang lebih 15 hari. Dalam kurun 3 hari sekali peneliti juga berusaha untuk mengingatkan responden agar segera mengisi kuesioner peneliti.

#### **3.5.4 Teknik Analisa**

##### **a. Analisis Kuantitatif Deskriptif**

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif merupakan gambaran atau gambaran tentang kumpulan data. Metode yang ada hubungannya dengan pengajian serta pengumpulan data sehingga akibatnya dapat memberi informasi



yang bermanfaat guna penyampaian atau mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti lewat populasi atau data sampel yakni statistik deskriptif.

### **3.6 Uji Kualitas Data**

#### **3.6.1 Uji validitas**

Dengan demikian, uji validitas dipakai guna menjadi pengukur valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018: 51). Kuesioner disebut valid manakala pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dapat meninggalkan beberapa derajat. Pengukuran validitas bisa dilaksanakan menggunakan item pertanyaan ataupun pernyataan apa pun yang terkait dengan skor total variabel. Sebutan atau pertanyaan dianggap sah jika angka  $r$  melebihi  $r$  tabel dan nilainya positif.

#### **3.6.2 Uji reliabilitas**

Merujuk yang dipaparkan (Ghozali, 2018: 47) reliabilitas yakni alat ukur dalam melihat konsistensi ataupun keandalan permintaan sebagai indikator suatu variabel. Item yang dimaksud dianggap reliabel atau dapat dipercaya jika jawaban orang tersebut terhadap pertanyaan tersebut sama. Pengukuran SPSS 26 berbantuan komputer dengan Cronbach Alpha ( $\alpha$ ), variabel tersebut dianggap reliabel karena memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,70$ .

#### **3.6.3 Uji asumsi klasik**

##### **1. Uji normalitas**

Uji normalitas merupakan metode yang dipakai selaku penguji suatu data yang apabila terdistribusi dengan normal maka berkemungkinan meminimalisir terjadinya bias. Pada penelitian ini guna mengetahui kenormalan distribusi data

sampel memakai *Kolmogorov Smirnov*. Jika nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka data terdistribusi normal.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## 2. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah suatu pengujian model regresi untuk mengetahui adanya korelasi atau tidak antara variabel independennya. Pada pengujian ini, model regresi yang baik sebenarnya tidak terdapat korelasi antara masing-masing variabel independennya. Untuk mengetahui terdapat multikolinearitas atau tidak harus mengetahui nilai tolerance (*tolerance value*) dan *variance inflation factor* (VIF) dengan dasar yakni:

Bilamana nilainya  $VIF < 10$  menandakan tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Bilamana nilainya  $VIF > 10$  menandakan terjadi masalah multikolinearitas.

## 3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual antar pengamatan. Apabila satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya yang varian dari residualnya itu tetap maka termasuk homoskedastisitas. Seharusnya model regresi yang digunakan tidak terdapat heteroskedastisitas tetapi homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *scatter plot*. Ada kemungkinan yang muncul yakni:

1. Model regresi dianggap bebas heteroskedastisitas jika hasil scatter plot tidak membentuk pola yang jelas dengan titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y..
2. Model regresi tampak memiliki heteroskedastisitas manakalahasil diagram scatter plot dibuat dalam pola tertentu, seperti kurva, kerucut, dan lainnya.
3. Uji autokorelasi

Kemunculan autokorelasi sebab sepanjang waktu terjadi observasi yang berurutan dan saling berhubungan. Kemunculan masalah tersebut dikarenakan pada satu observasi ke observasi lainnya residual tidak bebas. Model yang terbebas dari autokorelasi menandakan bahwasanya model regresi itu baik. Guna melihat keberadaan autokorelasi dilakukannya uji Run Test.

### 3.6.4 Uji Hipotesis

#### a. Uji Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)

Uji t ini dilaksanakan guna melihat perolehan pengaruh secara parsial yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. (Ghazali, 2018). Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Untuk menentukan apakah terdapat atau tidak pengaruh masing-masing variabel, maka dibentuklah kriteria sebagai berikut:

1) Jika  $P\text{-value} < 0,05$

Maka memperlihatkan bahwasannya sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak secara parsial memiliki pengaruh atau nyata terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Jika  $P\text{-value} > 0,05$

Maka memperlihatkan bahwasannya sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh atau nyata terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### b. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Pengujian ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar daya variabel independen dalam menguraikan atau mengungkapkan variabel dependen (Putro & Kamal, 2013). Nilai yang dikeluarkan oleh uji koefisien determinasi yaitu sekitar nol hingga satu. Nilai koefisien determinasi yang rendah atau mendekati nol maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel-variabel independen kurang dalam mengungkapkan variabel dependen. Dan apabila nilainya tinggi atau mendekati satu dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen mempunyai kemampuan dalam memberikan segala informasi yang digunakan dalam menaksir variabel dependen. Maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Jika hasilnya 1 (semakin besar nilai R<sup>2</sup>), berarti kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial semakin kuat.
- 2) Jika hasil mendekati 0 (semakin kecil nilai R<sup>2</sup>) berarti kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial agak lemah.

#### 3.6.5 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau serempak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Rumus dari uji F adalah :

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

Keterangan :

$s_1^2$  = variasi kelompok 1

$s_2^2$  = variasi kelompok 2

Hipotesis pengujian dari uji F adalah :

$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$  (varian data homogen)

$H_6 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$  (varian data tidak homogen)

Penggunaan taraf signifikan uji F beragam, tergantung pemilihan peneliti yaitu 0,01 (1%), 0,05 (5%) dan 0,10% (10%).

Sebagai contoh jika pengujian dilakukan dengan taraf pengujian  $\alpha = 5\%$  (0,05).

Bentuk pengujiannya, yaitu:

1. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ ,  $H_0$  diterima, artinya variabel independen berpengaruh tidak signifikan secara bersamaan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikansi  $= 0,05$ , maka  $H_6$  diterima, artinya variabel independent berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap variabel dependen.

3. Uji parsial (uji statistik t)

Intinya uji statistik t dibuat guna menguji variable bebas secara individu terhadap variabel terikat. Pelaksanaan pengujian mempergunakan signifikan dengan level yakni 0,05 ( $\alpha=5\%$ ).

1. Apabila signifikan bernilai  $t > 0,05$  menandakan hipotesis ditolak. Artinya secara parsial variabel bebas itu tidak berpengaruh signifikan pada variabel terikat.

2. Apabila signifikan bernilai  $t = 0,05$  menandakan hipotesis diterima. Artinya variabel bebas tadi secara parsial berpengaruh signifikan pada variabel terikat (Putra, n.d.).

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan dengan melakukan penyebaran angket/kuesioner pada responden seluruh anggota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jl Johar Nomor 19-21, Alun-alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD Jatim) merupakan instansi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan. Penelitian ini menggunakan Teknik Sampel Jenuh dimana proses penyebaran kuesioner dilaksanakan melalui cara menyebar kuesioner kepada seluruh anggota BPKAD Jatim yang kurang lebih 116 responden. Berikut data rincian hasil penyebaran kuesioner :

**Tabel 4.1 Kuesioner**

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase
1	Jumlah kuesioner yang disebar	116	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak Kembali	16	13,7%
3	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%
4	Kuesioner yang dapat diolah	100	86,2%

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Karakteristik Responden

Pada penelitian ini telah dilakukan pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner kepada 116 responden dengan total 100 kuesioner Kembali dan diolah. Responden dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Berikut hasil pengumpulan kuesioner dari para responden :

Berdasarkan Jenis Kelamin dapat diketahui gambaran mengenai jenis kelamin responden sebagai Berikut :

**Tabel 4.2 Karakteristik Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	32	32%
Wanita	68	68%
Total	100	100%

*sumber : data diolah, 2022*

Dapat dilihat dari table diatas jumlah responden laki-laki sebanyak 32 orang dengan persentase 32% dan jumlah responden perempuan sebanyak 68 responden dengan persentase 68%.



Berdasarkan Umur dilakukannya penyebaran kuesioner dapat diketahui umur dari masing-masing responden :

**Tabel 4.3 Hasil Data Responden**

Usia	Jumlah	Persentase
>40 tahun	28	28%
25-40 tahun	32	32%
25< tahun	40	40%
Total	100	100%

Sumber : Data Diolah 2022

Dari Tabel diatas dilihat jumlah responden yang berumur dibawah 25 tahun sebesar 40 responden dengan persentase 40%, jumlah responden dengan umur diantara 2-40 tahun sebesar 32 responden dengan persentase 32% dan responden diatas 40 tahun berjumlah 28 responden dengan persentase 28%.

#### 4.2.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas adalah uji yang mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghazali, 2018). Indikator suatu variabel dikatakan valid jika memiliki koefisien korelasi dengan total sebesar  $\geq 0,30$ . Di samping itu, instrumen penelitian dikatakan reliabel jika memiliki koefisien Alpha Cronbach  $\alpha \geq 0,60$ . Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1 dan secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas**

Variabel Penelitian	Item	Koefisien Korelasi	Uji Validitas	Uji Reliabilitas
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	X1 <sub>1</sub>	0,774	Valid	0,865 (Reliabel)
	X1 <sub>2</sub>	0,748	Valid	
	X1 <sub>3</sub>	0,773	Valid	
	X1 <sub>1</sub>	0,821	Valid	
	X1 <sub>2</sub>	0,745	Valid	
	X1 <sub>3</sub>	0,784	Valid	
Kualitas Pelaporan (X2)	X2 <sub>1</sub>	0,600	Valid	0,938 (Reliabel)
	X2 <sub>2</sub>	0,634	Valid	
	X2 <sub>3</sub>	0,820	Valid	
	X2 <sub>4</sub>	0,813	Valid	
	X2 <sub>5</sub>	0,744	Valid	
	X2 <sub>6</sub>	0,742	Valid	
	X2 <sub>7</sub>	0,690	Valid	
	X2 <sub>8</sub>	0,769	Valid	
	X2 <sub>9</sub>	0,793	Valid	
	X2 <sub>10</sub>	0,748	Valid	
	X2 <sub>11</sub>	0,756	Valid	
	X2 <sub>12</sub>	0,710	Valid	
	X2 <sub>13</sub>	0,716	Valid	
	X2 <sub>14</sub>	0,722	Valid	

	X2 15	0,744	Valid	
	X3 1	0,762	Valid	
	X3 2	0,666	Valid	
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)	X3 3	0,757	Valid	0,812 (Reliabel)
	X3 4	0,780	Valid	
	X3 5	0,812	Valid	
	Y1	0,763	Valid	
	Y2	0,781	Valid	
	Y3	0,802	Valid	
	Y4	0,771	Valid	
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Y5	0,641	Valid	0,905 (Reliabel)
	Y6	0,698	Valid	
	Y7	0,772	Valid	
	Y8	0,715	Valid	
	Y9	0,761	Valid	
	Y1 0	0,648	Valid	

Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 1)

Uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 100 responden. Dapat diketahui bahwa masing-masing item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi 0,3. Sehingga syarat validitas dengan nilai koefisien minimal 0,3 terpenuhi.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan masing-masing variabel memiliki nilai koefisien *Alpha Croncach*  $> 0,6$ . Oleh karena itu, setiap variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau syarat reliabilitas terpenuhi.

#### 4.2.3 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban dari hasil kuesioner. Dengan cara mengumpulkan data dari hasil

jawaban responden selanjutnya ditabulasi dalam tabel dan dilakukan pembahasan secara deskriptif. Ukuran deskriptif adalah pemberian angka, baik dalam jumlah responden beserta nilai rata-rata jawaban responden maupun prosentase. Analisis data ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang variabel Independen dan Dependen.

Kemudian untuk mengkategorikan rata-rata jawaban responden dibuat skala interval yang dihitung dari skor tertinggi yang dikurangi skor terendah dibagi lima, diperoleh interval untuk kategori sebesar 0,80, dengan demikian kategori jawaban responden ditentukan berdasarkan skala sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Penentuan Kategori Skor Berdasarkan Kategori Jawaban Responden**

No	Skala Kategori Jawaban	Kategori Skor
1	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 - 2,60	Rendah
3	2,61 - 3,40	Cukup Tinggi
4	3,41 - 4,20	Tinggi
5	4,21 - 5,00	Sangat Tinggi

*Sumber : Sugiyono (2013)*

### 4.2.3.1 Deskripsi Variabel Penelitian

#### 1. Deskripsi Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) terdiri atas 10 item pertanyaan. Hasil deskripsi variabel penelitian dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.6 Persentase Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Item	Persentase Jawaban Responden										Rata-rata
	1		2		3		4		5		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y1	2	2	1	1	10	10	49	49	38	38	4,20
<b>Y2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>4,28</b>
Y3	1	1	1	1	7	7	53	53	38	38	4,26
Y4	1	1	1	1	9	9	55	55	34	34	4,20
Y5	1	1	1	1	16	16	49	49	33	33	4,12
Y6	1	1	0	0	13	13	55	55	31	31	4,15
Y7	1	1	0	0	10	10	53	53	35	35	4,19
Y8	1	1	2	2	9	9	48	48	40	40	4,24
Y9	1	1	4	4	11	11	50	50	34	34	4,12
Y10	2	2	0	0	11	11	51	51	36	36	4,19
Rata-rata Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)											4,20

Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 4.2.1)

Dari tabel di atas terlihat bahwa Item Y2 yaitu berada pada level paling tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,28. Artinya responden melihat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) utamanya dilihat dari Item Y2. Nilai rata-rata keseluruhan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar 4,20 berada pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dinilai tinggi oleh responden.

## 2. Deskripsi Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) terdiri atas 6 item pertanyaan. Hasil deskripsi variabel penelitian dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.7 Persentase Jawaban Responden Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)**

Item	Persentase Jawaban Responden										Rata-rata
	1		2		3		4		5		
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X11	1	1	0	0	8	8	52	52	39	39	4,28
X12	1	1	1	1	12	12	53	53	33	33	4,16
X13	1	1	2	2	14	14	50	50	33	33	4,12
X14	1	1	3	3	23	23	40	40	33	33	4,01
<b>X15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>4,34</b>
X16	2	2	2	2	16	16	41	41	39	39	4,13
Rata-rata Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)											4,17

*Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 4.2.2)*

Dari tabel di atas terlihat bahwa Item X15 yaitu berada pada level paling tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,34. Artinya responden melihat Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) utamanya dilihat dari Item X15. Nilai rata-rata keseluruhan pada Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) sebesar 4,17 berada pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dinilai tinggi oleh responden.

## 3. Deskripsi Variabel Kualitas Pelaporan (X2)

Variabel Kualitas Pelaporan (X2) terdiri atas 15 item pertanyaan. Hasil deskripsi variabel penelitian dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.8 Persentase Jawaban Responden Kualitas Pelaporan (X2)**

Item	Persentase Jawaban Responden					Rata-rata			
	1	2	3	4	5				
X2 1		1	1	1	1	6	6	30	4,
X2 2		3	3	8	8	5	5	23	4,
X2 3				4	4	3	3	15	4,
X2 4		8	8	9	9	8	8	09	4,
X2 5		6	6	2	2	9	9	16	4,
X2 6		7	7	6	6	2	2	04	4,
X2 7		7	7	8	8	4	4	24	4,
X2 8		3	3	5	5	7	7	13	4,
X2 9		1	1	1	1	6	6	20	4,
X2 10				2	2	6	6	20	4,
X2 11		4	4	7	7	6	6	15	4,
X2 12				0	0	9	9	24	4,
X2 13		1	1	5	5	9	9	17	4,
X2 14		7	7	0	0	1	1	19	4,
X2 15		4	4	7	7	7	7	18	4,
Rata-rata Variabel Kualitas Pelaporan (X2)								18	4,

Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 4.2.3)

Dari tabel di atas terlihat bahwa Item X22 berada pada level paling tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,30. Artinya responden melihat Kualitas Pelaporan (X2) utamanya dilihat dari Item X22. Nilai rata-rata keseluruhan pada Kualitas Pelaporan (X2) sebesar 4,18 berada pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Kualitas Pelaporan (X2) dinilai tinggi oleh responden.

#### 4. Deskripsi Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)

Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) terdiri atas 5 item pertanyaan. Hasil deskripsi variabel penelitian dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.9 Persentase Jawaban Responden Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)**

Item	Persentase Jawaban Responden					Rata-rata				
	1	2	3	4	5					
X31			1	1	4	4	0	0	18	4,3
<b>X32</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>4,28</b>
X33			1	1	0	0	6	6	98	3,3
X34			5	5	5	5	7	7	95	3,3
X35			3	3	9	9	4	4	92	3,3
Rata-rata Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)									4,06	

*Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 4.2.4)*

Dari tabel di atas terlihat bahwa Item X32 berada pada level paling tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,28. Artinya responden melihat Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) utamanya dilihat dari Item X32. Nilai rata-rata keseluruhan pada Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) sebesar 4,06 berada pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) dinilai tinggi oleh responden.

### 4.3 Uji Asumsi Regresi Linier Berganda

#### 4.4.1 Uji Asumsi Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki distribusi normal. Model regresi dengan distribusi residual normal adalah



model yang baik. Pengujian normalitas residual dilakukan dengan teknik statistik Kolmogorov-Smirnov Test yang tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 4.10 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

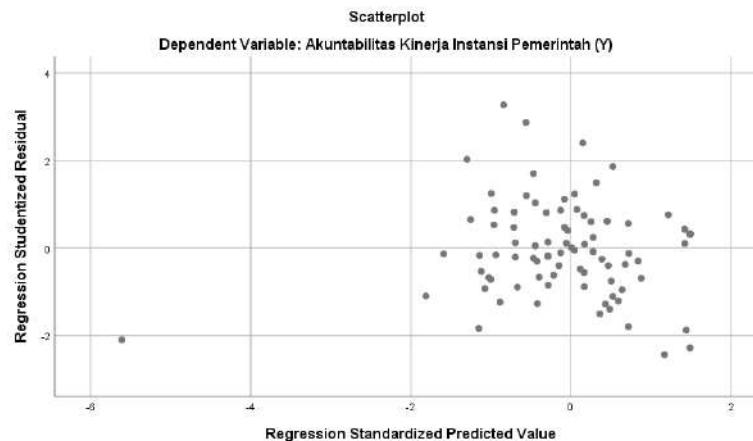
<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,07729444
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,074
	Negative	-,061
Test Statistic		,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

*Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 4.2.1.1)*

Hasil uji normalitas residual dengan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp.Sig sebesar 0.200. Berdasarkan tabel output, nilai uji Asymp.Sig > nilai  $\alpha$  (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.

#### 4.4.2 Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi heteroskedastisitas (*heteroscedasticity*) bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat ketidaksamaan varians dari residual satu kepengamatan lain.



**Gambar 4.2.2.1 Scatterplot**

Secara subjektif hasil uji heterokedastisitas pada tampilan grafik scatter plot di atas menunjukkan bahwa terjadi masalah heterokedastis. Hal ini dapat dilihat dari terdapat sebaran data yang merata di sebelah kanan sehingga dengan alasan tersebut perlu dilakukan uji Glejser untuk memastikan bahwa asumsi heterokedastisitas terpenuhi.

Dilakukan uji Glejser untuk memastikan bahwa asumsi heterokedastisitas terpenuhi. Hasil uji Glejser tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 4.11 Hasil Uji Glejser**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,640	1,561		2,973	,004
	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	,014	,097	,025	,143	,887
	Kualitas Pelaporan (X2)	-,022	,043	-,097	-,517	,606
	Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)	-,064	,092	-,098	-,702	,484

a. Dependent Variable: Absres

Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 1)

Hasil pengujian asumsi heterokedastisitas didapatkan bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel yaitu tidak signifikan dengan  $p - \text{value} > \text{nilai } \alpha (0.05)$  sehingga disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas.

#### 4.4.3 Uji Asumsi Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang yang tidak terjadi korelasi yang kuat antar variabel independen. Pada pembahasan ini akan dilakukan uji multikolinieritas dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) pada model regresi. Hasil uji multikolinieritas tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	,326	3,066
	Kualitas Pelaporan (X2)	,287	3,488
	Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)	,522	1,917

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 2)

Dengan melihat Nilai VIF (Varian Inflation Factor) diketahui bahwa seluruh variabel tidak memiliki nilai VIF lebih dari 10, serta nilai tolerance yang kurang dari 0.10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Multikolinieritas atau asumsi multikolinieritas telah terpenuhi.

#### 4.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2), dan Ketaatan

Pada Peraturan Perundangan (X3) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Berikut adalah hasil regresi linier berganda:

#### 4.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

**Tabel 4.13 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2231,246	3	743,749	76,159	,000 <sup>b</sup>
	Residual	937,504	96	9,766		
	Total	3168,750	99			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)						
b. Predictors: (Constant), Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3), Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2)						

Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 4.2.6)

Berdasarkan hasil Uji F tersebut, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $\alpha < 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2), dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### 4.3.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

**Tabel 4.14 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,907	2,385		2,896	,005
	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	,433	,148	,285	2,929	,004
	Kualitas Pelaporan (X2)	,316	,065	,503	4,850	,000
	Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3)	,216	,140	,118	1,537	,128

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 4.2.7)

Dari hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Pengujian pengaruh antara Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) diperoleh nilai koefisien sebesar 0.433 dengan nilai signifikansi sebesar 0.004, karena nilai signifikansi  $< 0.05$  maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Mengingat koefisien bertanda positif mengindikasikan bahwa hubungan keduanya positif, Artinya semakin tinggi responden mepersepsikan Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) akan mengakibatkan semakin tinggi pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), begitu juga sebaliknya.

Pengujian pengaruh antara Kualitas Pelaporan (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) diperoleh nilai koefisien sebesar 0.316 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, karena nilai signifikansi  $< 0.05$  maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelaporan (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Y). Mengingat koefisien bertanda positif mengindikasikan bahwa hubungan keduanya positif, Artinya semakin tinggi responden mepersepsikan Kualitas Pelaporan (X2) akan mengakibatkan semakin tinggi pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), begitu juga sebaliknya.

Pengujian pengaruh antara Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) diperoleh nilai koefisien sebesar 0.216 dengan nilai signifikansi sebesar 0.128, karena nilai signifikansi  $>$  0.05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Artinya kenaikan atau penurunan responden dalam mempersepsikan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), begitu juga sebaliknya.

#### **4.3.3 Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui besarnya nilai kontribusi atau pengaruh antar variabel bebas, yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2), dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) terhadap variabel terikat, yaitu terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebagai berikut:

**Tabel 4.15 Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,839 <sup>a</sup>	,704	,695	3,12501
a. Predictors: (Constant), Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3), Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2)				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)				

Sumber: Data primer diolah, 2022 (Lampiran 4.2.8)

Tabel diatas merupakan bagian hasil dari uji regresi linier berganda yang dapat disebut sebagai Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Analisis ini digunakan sebagai pengukur besarnya pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2), dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) terhadap variabel terikat, yaitu terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R Square ( $R^2$ ) adalah 0,839 yang dapat disimpulkan Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2), dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) mempunyai pengaruh sebesar 83,9% sedangkan sisanya 16,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

#### 4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan Analisis Regresi Berganda diperoleh hasil pengujian hipotesis seperti yang tersaji sebagai berikut ini:

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah diterima. Pengujian pengaruh antara Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Y) diperoleh nilai koefisien sebesar 0.433 dengan nilai signifikansi sebesar 0.004, karena nilai signifikansi  $< 0.05$  maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Mengingat koefisien bertanda positif mengindikasikan bahwa hubungan keduanya positif, Artinya semakin tinggi responden mepersepsikan Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) akan mengakibatkan semakin tinggi pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), begitu juga sebaliknya.

Kualitas Pelaporan (X2) berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah diterima. Pengujian pengaruh antara Kualitas Pelaporan (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) diperoleh nilai koefisien sebesar 0.316 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, karena nilai signifikansi  $< 0.05$  maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelaporan (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Mengingat koefisien bertanda positif mengindikasikan bahwa hubungan keduanya positif, Artinya semakin tinggi responden mepersepsikan Kualitas Pelaporan (X2) akan mengakibatkan semakin tinggi pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), begitu juga sebaliknya.

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah ditolak. Pengujian pengaruh antara Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) diperoleh nilai koefisien sebesar 0.216 dengan nilai signifikansi sebesar 0.128, karena nilai signifikansi  $> 0.05$  maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) terhadap



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Artinya kenaikan atau penurunan responden dalam mempersepsikan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), begitu juga sebaliknya.

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2), dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah diterima. Berdasarkan hasil Uji F tersebut, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $\alpha < 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2), dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

#### **4.6 Pembahasan**

Dengan hasil yang telah dilakukan pada Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DAERAH Provinsi Jawa Timur, Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Merujuk dari hasil penelitian yang telah diperhitungkan pengujian pengaruh antara Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) diperoleh nilai koefisien sebesar 0.433 dengan nilai signifikansi sebesar 0.004, karena nilai signifikansi  $< 0.05$  maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Dari hasil yang didapat koefisien bertanda positif

mengindikasikan bahwa hubungan keduanya positif, yang berarti semakin tinggi responden mepersepsikan Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) akan mengakibatkan semakin tinggi pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), begitu juga sebaliknya. Pada hal ini Kejelasan Sasaran Dianggap penting bagi anggota BPKD Provinsi Jawa Timur, setelah adanya kasus yang membawa Ketua BPKAD Provinsi sebelumnya hal ini menjadi pelajaran yang besar untuk pemimpin BPKAD Provinsi Jawa Timur selanjutnya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Azizah Rahman dan Marwah Yusuf serta pebri Asari Putra menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kualitas Pelaporan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hasil penelitian yang telah diperhitungkan dengan pengujian pengaruh antara Kualitas Pelaporan (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) diperoleh nilai koefisien sebesar 0.316 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, karena nilai signifikansi < 0.05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelaporan (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Dengan hasil koefisien bertanda positif mengindikasikan bahwa hubungan keduanya positif, Artinya semakin tinggi responden mepersepsikan Kualitas Pelaporan (X2) akan mengakibatkan semakin tinggi pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), begitu juga sebaliknya. Meningkatnya kualitas Pelaporan pada suatu Instansi termasuk bentuk tanggungjawab penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan publik terhadap instansi dalam

mencapai tujuan yang telah diterapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Nining Asniar Ridzal bahwa secara signifikan kualitas pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Pengujian pengaruh antara Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) diperoleh nilai koefisien sebesar 0.216 dengan nilai signifikansi sebesar 0.128, karena nilai signifikansi  $> 0.05$  maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Artinya kenaikan atau penurunan responden dalam mempersepsikan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), begitu juga sebaliknya. Dengan mematuhi perundangan sendiri dapat merujuk pada kesadaran hukum setiap warga negaranya. Dalam perwujudan GoodGovernance pun Ketaatan Perundangan mengambil andil akan hal tersebut, karena dengan mematuhi peraturan perundangan yang ada dapat menciptakan kehidupan yang damai, aman dan tertib. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, menurut evada dewata peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial. Sehingga dapat dipertanyakan akan kesadaran hukum anggota BPKAD Provinsi Jawa Timur terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2), dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Berdasarkan hasil Uji F tersebut, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $\alpha < 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2), dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Berdasarkan hasil yang sudah didapatkan, sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai teori Stewardship. Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Wyatt, 2006). Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari Stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup, dalam hal ini hubungan teori dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **4.6.1 Sasaran Anggaran (X1) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap variabel terikat dengan variabel bebas yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hal tersebut sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu Teori *Stewardship*, teori tersebut menjelaskan bahwa “kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan”, hal ini kekayaan yang dimaksud dalam teori Steward adalah

anggaran atau kesehatan keuangan yang ada didalam organisasi tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja dalam sebuah organisasi, termasuk orang-orang yang terlibat dalam sebuah organisasi pemerintah. Sasaran anggaran dalam sebuah organisasi pemerintah sangat penting direncanakan dengan baik dan benar agar kinerja dalam instansi pemerintah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

#### **4.6.2 Kualitas Pelaporan (X2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan yaitu Kualitas Pelaporan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hubungan dengan teori yang telah dibahas dalam bab sebelumnya yaitu Teori *Stewardship*, yang berbunyi “akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik”, dikaitkan dengan teori tersebut bahwa kualitas pelaporan keuangan bermanfaat untuk informasi yang lebih berkualitas. Pemerintah yang bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

#### **4.6.3 Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y).**

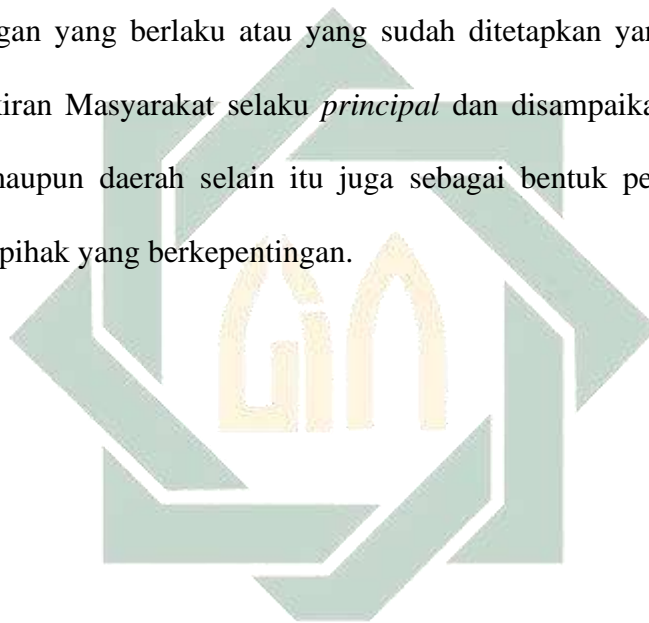
Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan yaitu Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hasil tersebut berhubungan positif

dengan teori *Stewardship*, variabel sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan sebagai faktor penentunya. Semakin tinggi faktor penentu tersebut maka akan semakin tinggi pula kemungkinan pencapai tujuannya. Selain itu, variabel komitmen organisasi ditetapkan sebagai penguat pengaruh factor penentu terhadap pencapaian tujuannya. Sesuai dengan teori Steward yang berisi “Demi tercapainya keberhasilan suatu organisasi maka seorang steward akan melindungi dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya melalui kinerja dari organisasi sehingga fungsi dalam pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara maksimal atau memaksimalkan tujuan organisasi”. Namun pada variable ini terbukti tidak berpengaruh secara signifikan, oleh sebab itu perlu ditingkatkannya komitmen organisasi ini..

#### **4.6.4 Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2), dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y).**

Berdasarkan hasil yang telah diujikan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2), dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hubungan teori *Stewardship* dengan semua variabel yang telah diujikan bahwa steward yang merupakan pemerintah akan berperilaku kolektif atau berkelompok, dengan demikian, terjadi kesepakatan di antara dua belah pihak yaitu pemerintah sebagai steward dan masyarakat sebagai principal yang berdasar kepada kepercayaan dan dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan tujuan dari organisasi. Pemerintah daerah selaku steward akan menjalankan fungsinya

pengelolaan sumber daya dan berusaha secara maksimal dalam menjalankan pemerintahan yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik dan dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik). Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah tidak didasarkan atas paksaan dari pihak yang berkepentingan, akan tetapi merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan selaku steward atau berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang sudah ditetapkan yang dibuat dan didasarkan pemikiran Masyarakat selaku *principal* dan disampaikan oleh badan legislatif pusat maupun daerah selain itu juga sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Kualitas Pelaporan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Pelaporan (X2), dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

#### **5.2 Saran**

Melihat dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, Berikut terdapat saran yang bisa digunakan untuk bahan pertimbangan sebagai refrensi untuk bahan pertimbangan untuk instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur maupun Penelitian selanjutnya, yaitu :



1. Bagi pihak instansi Pemerintah BPKAD JATIM agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kejelasan sasaran anggarannya serta kualitas pelaporan keuangan.
2. Berdasarkan penelitian ini diharapkan untuk dapat meningkatkan penerapan akuntansi sektor publik agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat lebih baik, seperti dilakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran.
3. Bagi para pegawai akuntansi atau keuangan yang terlibat langsung dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan, untuk dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang standar akuntansi pemerintah dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta untuk lebih memerhatikan ketepatan waktu dalam membuat laporan keuangan. Serta lebih memerhatikan Acuan PSAP 02 Mengenai penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana diatut dalam peraturan perundangan.
4. Berdasarkan penelitian ini diharapkan untuk para pegawai lebih sering mengikuti sosialisasi, seminar atau segala pelatihan yang berhubungan dengan ketaatan perundangan.
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan yang tidak hanya berfokus pada kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja tetapi dapat pula dikembangkan ke variable lain yang belum diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Andriani, H., & Sukmana, D. J. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April).
- Asih, P., & Panca, W. (2021). Pengaruh Audit Kinerja dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik ( Studi Kasus pada Skpd Kota Semarang ). *REKAN ; Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 73–86. <https://doi.org/10.30812/rekan.v2i1.1047>
- Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, (2014).
- Buchori, I. (2021). Mediating Factors That Influence The Relation Between Budget Congruence and Managerial Performance in Publik Services Universities in Indonesia. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 04(11), 2312–2323. <https://doi.org/10.47191/jefms/v4-i11-24>
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., Lestari, T. D., & Sriwijaya, P. N. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 541–550. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26342>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2021a). *Gubernur Minta BPKAD Jatim Data Aset Tanah dan Bangunan*. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-minta-bpkad-jatim-data-aset-tanah-dan-bangunan>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2021b). *KPK Minta Pemda di Jatim Segera Selesaikan Sertifikasi Aset*. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kpk-minta-pemda-di-jatim-segera-selesaikan-sertifikasi-aset>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2021c). *Plh. Sekdaprov Jatim Minta APBD Direalisasikan secara Transparan, Bertanggung Jawab dan Akuntabel*. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/plh-sekdaprov-jatim-minta-apbd-direalisasikan-secara-transparan-bertanggung-jawab-dan-akuntabel>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fadhilurrohman, M. I., & Khairina, E. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Studi komparatif Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman). *Jurnal MODERAT*, 7(2), 242–256.
- Ghazali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.  
[https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=kbnkIQQAAAAJ&citation\\_for\\_view=kbnkIQQAAAAJ:XeErXHja3Z8C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=kbnkIQQAAAAJ&citation_for_view=kbnkIQQAAAAJ:XeErXHja3Z8C)

- Global, I. (n.d.). *PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan*. Retrieved February 8, 2022, from <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-7-psak-1-penyajian-laporan-keuangan>
- H, T. A. (2019). *KPK kembali panggil mantan Kepala BPKAD Jatim Budi Setiawan - ANTARA News*. <https://www.antaraneews.com/berita/973282/kpk-kembali-panggil-mantan-kepala-bpkad-jatim-budi-setiawan>
- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Herawaty, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 6(2), 151–161. <https://doi.org/10.36448/jak.v10i1.1209>
- Karima, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 10(06), 10–24.
- Kiki Andriany Hai, Ruddy R. Watulingas, R. S. (2021). Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Lex Administratum*, 12(1), 29–40.
- Law, A., Kristen, U., Wacana, S., Suwartiningsih, S., Kristen, U., Wacana, S., Utomo, A. W., Kristen, U., & Wacana, S. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Sosialisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Kepada Masyarakat. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(3), 426–440.
- Mardiasmo. (2021). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru - Google Buku*. [https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
- Martudji. (2021). *Pembahasan Perubahan APBD Jatim Diwarnai Interupsi dan Walk Out*. <https://infonews.id/baca-3050-pembahasan-perubahan-apbd-jatim--diwarnai-interupsi-dan-walk-out>
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2014).
- Putra, P. A. (n.d.). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ( Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi ). *Juhanperak*, 474–492.
- Putro, R. Y. A., & Kamal, M. (2013). Analisis Pengaruh Brand Reputation, Brand Competence, dan Brand Liking Terhadap Trust In Brand Pada Konsumen Windows Phone Nokia di Surabaya. *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 10(2), 178–185. <https://doi.org/10.14710/jsmo.v10i2.5916>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Erlangga
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- YUME : Journal of Management*, 4(2), 257–270.  
<https://doi.org/10.37531/yume.vxix.334>
- Razi, R. F. (2017). Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *JOM Fekon*, 4(1), 294–308.
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97.  
<https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.135>
- Siregar, S. (2017). *Statistika deskriptif untuk penelitian : dilengkapi perhitungan manual dan aplikasi SPSS versi 17*. OPAC Perpustakaan Nasional RI.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135647#>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Suminar, A. (2021). *APBD Jatim 2022, Belanja Pegawai Naik, Pemulihan Ekonomi Digenjot* - *Suara Surabaya*.  
<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/apbd-jatim-2022-belanja-pegawai-naik-pemulihan-ekonomi-digenjot/>
- Wiguna, K. Y., Syafitri, A., & Putri, R. M. (2021). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(4), 106–125. <https://doi.org/10.47747/jismab.v2i4.509>
- Wyatt, A. (2006). An accounting perspective. *The Management of Intellectual Property*, 40–65. <https://doi.org/10.4337/9781847201553.00009>
- Yohanes, E. (2019). *KPK Geledah Kantor Dinas BPKAD Jatim Terkait Suap APBD Tulungagung* | *merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-geledah-kantor-dinas-bpkad-jatim-terkait-suap-apbd-tulungagung.html>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A